

Tol Trans-Jawa Terhambat Lahan

Setiap Ruas Miliki Masalah Tersendiri

JAKARTA, KOMPAS – Usaha pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol trans-Jawa yang dimulai sejak 2007, hingga saat ini masih terhambat permasalahan pembebasan lahan. Dari total luas 5.150,53 hektar baru 2.647,19 hektar atau sekitar 51,4 persen lahan yang telah selesai dibebaskan.

Kepala Pusat Komunikasi Publik, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Danis H Sumadilaga mengungkapkan, pembangunan infrastruktur jalan tol ini sangat diperlukan untuk mendukung peningkatan kebutuhan ekonomi.

"Sayangnya hal itu kerap terhambat masalah pembebasan lahan yang akan digunakan untuk jalan tol, padahal pembangunan ini juga tujuannya untuk pertumbuhan ekonomi," ujar Danis dihadapan para wartawan yang hadir dalam forum diskusi di Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Kamis (11/4).

Menurut Danis, pembebasan tersebut kerap kali harus menghadapi lahan-lahan yang sulit. "Lahan seperti wilayah kehutanan, tanah wakaf, tanah kas desa, dan lain sebagainya, harus kami cari gantinya. Kementerian Pekerjaan Umum juga sudah melakukan kewajaran harga. Penggantian tersebut sudah wajar dan baik," katanya.

Khusus untuk pembebasan lahan, masih menurut Danis, pemerintah mengalokasikan dana setiap tahunnya sekitar Rp 1 triliun.

"Tahun 2011 dana yang terserap hanya Rp 600 miliar, sedangkan tahun 2012 dana yang terserap sebesar Rp 800 miliar. Saya berharap tahun ini dana yang terserap semakin besar sehingga pembebasan tanah juga semakin luas," tuturnya.

Danis juga mengatakan, dana

kompensasi untuk pembebasan lahan tidak menjadi masalah di Kementerian Pekerjaan Umum.

"Beberapa kali sudah tercapai kesepakatan mengenai harga antara pemerintah dan warga. Namun, hal itu harus terhambat masalah administrasi seperti hak ahli waris, sertifikat tanah, dan lain sebagainya," ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan Kasubdit Pengadaan Tanah Achmad Herry Marzuki yang mengatakan, pihaknya mengalami kesulitan dalam melakukan pembebasan beberapa tanah untuk sembilan ruas tol dari Cikopo hingga Surabaya. Adapun sembilan ruas tersebut, yaitu Cikopo-Palimanan, Pejagan-Pemalang, Pemalang-Batang, Batang-Semarang, Semarang-Solo, Solo-Mantingan, Mantingan-Kertosono, Kertosono-Mojokerto, Mojokerto-Surabaya.

"Setiap ruas memiliki permasalahan sendiri, antara lain adanya desakan dari berbagai forum masyarakat (LSM), adanya warga yang meminta agar pembebasan ditunda dulu mengingat akan dilakukan pemilihan kepala desa, dan ada juga pemilik yang mengajukan syarat-syarat yang sulit direalisasi. Padahal jelas, kami memberikan harga yang bagus, sesuai dengan permintaan dan pastinya di atas harga pasar," kata Herry.

Beberapa permasalahan di setiap ruas juga dipaparkan oleh Herry. Menurut dia, ruas Pejagan-Pemalang-Batang-Semarang sampai saat ini terkendala

masalah tanah karena adanya pergantian investor. Sementara untuk ruas Semarang-Solo, pembangunan sudah sampai seksi Semarang-Ungaran. Diharapkan pada Juni tahun ini seksi Ungaran-Bawen sudah selesai penggarapannya sehingga dapat digunakan saat lebaran tahun ini.

Adapun untuk ruas Solo-Mantingan yang baru selesai 73,38 persen dan Mantingan-Kertosono yang baru selesai 43,27 persen tahun ini diharapkan bisa selesai 100 persen. Mengingat di wilayah tersebut terdapat 125 hektar kawasan hutan dengan panjang 12 kilometer. Adapun untuk ruas Kertosono-Mojokerto, saat ini sudah sampai tahap pelaksanaan fisik hingga 84 persen.

Di ruas Mojokerto-Surabaya, beberapa seksi harus terhambat akibat lahan yang akan digunakan untuk jalan tol masih terdapat pabrik dan gudang. Namun, Herry mengatakan, pihaknya telah berusaha bertemu dengan jajaran direksi perusahaan untuk membicarakan pembebasan lahan lebih lanjut. Tak hanya itu, Herry juga sempat menemukan warga yang memiliki tanah berupa sawah, tetapi ingin tanahnya dihargai senilai tanah permukiman.

Saat ditanya mengenai jangka waktu pembebasan lahan, Herry mengatakan, pihaknya kesulitan menentukan target waktunya.

"Kalau pembangunan konstruksi masih bisa ditargetkan. Namun, untuk pembebasan lahan, sulit untuk diprediksi," ujarnya.

Herry berharap masyarakat tidak mudah terpengaruh ajakan untuk menolak pembebasan lahan.

"Saya yakin masyarakat itu untung dengan kompensasi yang kami berikan. Harganya di atas harga pasar," tutur Herry. (K10)